

Motivasi Tiongkok Memperbaiki Hubungan Bilateral dengan Korea Selatan Pasca Polemik THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*)

Afdhal Yusra^{1*}, Muhammad Yusra^{2*}, Diah Anggraini Austin^{3*}

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Kota Padang, Indonesia

E-mail: afdhaljusra04@gmail.com*, muhammadyusra@fisip.unand.ac.id*,
diahanggrainiaustin@soc.unand.ac.id*

Abstract

North Korea's aggressiveness in launching ballistic missiles has threatened the security stability of East Asia. As a state under threat, South Korea formed a joint security partnership with the United States through the deployment of THAAD in 2016. However, China has opposed it by arguing that THAAD would threaten domestic and regional security stability. As a result, China's rejection led to the presence of the phenomenon of economic retaliation which resulted in a decrease in the value of South Korea-China bilateral trade and distrust. Nevertheless, after negotiations, the two countries decided to improve bilateral relations in 2017. This paper aims to determine China's motivation in improving bilateral relations with South Korea as a foreign policy decision after rejecting the deployment of THAAD under the guise of threatening to trigger bilateral polemics. This research will be analyzed through qualitative methods with the conceptual framework of foreign policy determinants by Shannon L. Blanton and Charles Kegley. In this conceptual framework, there are five determinants that influence foreign policy decision making namely military capabilities, economic conditions, type of government, global distributions of power, and geopolitical factors. Furthermore, Blanton & Kegley's conceptual framework identifies that each of these determinants influenced China's motivation to improving bilateral relations with South Korea after the THAAD polemic.

Keywords: South Korea, China, East Asia, Bilateral Relations, Foreign Policy.

PENDAHULUAN

Sejak normalisasi hubungan bilateral pada tahun 1992, Korea Selatan-Tiongkok telah memiliki ruang untuk meningkatkan hubungan kemitraan. Berdasarkan data pada tahun 2015, Tiongkok merupakan negara utama bagi Korea Selatan dalam perdagangan bilateral, dengan nilai ekspor mencapai 137 miliar USD (WITS (World Integrated Trade Solutions) 2015). Kedekatan dua negara berlanjut pada bidang keamanan, keterlibatan Tiongkok pada *Six Party Talks* dipandang Korea Selatan sebagai peluang agar Tiongkok mendukung denuklirisasi Korea Utara yang menjadi ancaman stabilitas keamanan di kawasan (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea 2003). Akan tetapi, hubungan bilateral akan menghadapi tantangan disaat adanya ancaman eksistensial bagi negara di tengah upaya mencapai kepentingan nasional

(Pannier 2020). Hal tersebut dapat dilihat pada pola hubungan bilateral Korea Selatan-Tiongkok disaat polemik THAAD terjadi.

Keagresifan Korea Utara dalam melakukan uji coba peledakan ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*) telah membawa babak baru bagi dinamika hubungan di kawasan Asia Timur. Menghadapi hal tersebut, Korea Selatan bersama Amerika Serikat menempatkan sistem keamanan anti rudal balistik, THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*) pada tahun 2016 (Defense 2016). Menanggapi keputusan Korea Selatan mengenai THAAD, Tiongkok menunjukkan sikap penolakan. Kemarahan Tiongkok merambah pada pemberian pembalasan ekonomi terhadap Korea Selatan. Akibat dari pembalasan ekonomi, Korea Selatan diperkirakan telah mengalami kerugian hingga 7.3 miliar USD (Korea Herald, 2017).

Setelah melalui ketegangan dalam menghadapi kontroversi, Korea Selatan berinisiasi untuk meredam sentimen pasca polemik THAAD (Taylor 2017). Berbagai upaya diplomasi dilakukan, Tiongkok mengakhiri pembalasan ekonomi dengan ditetapkannya kesepakatan *Three No's*. Perisinggungan kepentingan seperti ini kerap dialami Tiongkok dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Timur, sehingga mampu memperkeruh situasi global. Dengan tantangan geopolitik yang dihadapi, Tiongkok pada dasarnya telah membentuk konsep kebijakan yang mendukung kemitraan guna mencapai perdamaian sehingga potensi konflik terutama dengan negara tetangga dapat dihindari.

Dalam konteks "*the Rise of China*", Tiongkok sejatinya membutuhkan situasi lingkungan internasional yang mendukung dalam operasionalisasi kepentingan nasional. Prinsip kebijakan luar negeri Tiongkok dalam mencapai tujuan tersebut telah diinisiasikan sejak pemerintahan Jiang Zemin melalui "*New Security Concept*". Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan kesetaraan dalam kemitraan global (Takahara 2012). Selain itu, Xi Jinping membawa perubahan lebih lanjut bagi Tiongkok yang dinilai lebih proaktif melalui prinsip "*Peaceful Rise 2.0*" mengatasi persepsi negatif global atas "ancaman Tiongkok" (Zhang 2015). Dengan demikian, di tengah rusaknya hubungan Tiongkok di kawasan Asia Timur, Tiongkok memproyeksikan arah kebijakan luar negeri sebagaimana yang telah dipaparkan guna mempromosikan kemitraan global dalam mencapai lingkungan internasional yang damai.

METODE

Penelitian yang peneliti rancang ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini kaya akan narasi dan analisis yang mendalam. Guna memperoleh hasil penelitian yang matang, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis dalam proses penelitian ini. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mencoba menghimpun data berjenis sekunder (*secondary data*), dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari literatur-literatur seperti buku, artikel jurnal, berita, majalah, laporan resmi dari suatu institusi, dan lain-lain.

Berkaca pada tujuan penelitian ini yang mencoba menjelaskan apa yang menjadi motivasi Tiongkok memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD. Diksi “motivasi” didefinisikan sebagai bentuk faktor-faktor pendorong tindakan Tiongkok dalam merumuskan pilihan negara melalui kebijakan luar negeri. Selain itu, pilihan diksi polemik digunakan sebagai penggambaran studi kasus yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan dua aktor yaitu Tiongkok dan Korea Selatan terkait penempatan THAAD hingga menghasilkan polemik tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 1992, Korea Selatan dan Tiongkok secara resmi menormalisasi hubungan diplomatik (Hwang and Choi 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tiongkok dalam Dinamika Kawasan Asia Timur

1. Dinamika Bilateral Tiongkok dan Korea Selatan

Hubungan bilateral yang strategis antara Korea Selatan-Tiongkok telah melalui berbagai dinamika bilateral hingga multilateral. Sepanjang tahun 1950-an hingga 1960-an kedua negara berada pada fase hubungan yang diwarnai permusuhan. Pada saat itu Tiongkok mempertahankan posisi pengakuan atas Korea Utara sebagai satu-satunya negara berdaulat di Semenanjung Korea (Ho Chung 2014).

Pemulihan hubungan bilateral sejak tahun 1992 telah memberikan ruang bagi kedua negara untuk mencapai kepentingan nasional. Komitmen kerjasama bilateral ditunjukkan melalui kesepakatan *Free Trade Area* tahun 2015, hingga mampu meningkatkan nilai perdagangan bilateral menjadi 300 miliar USD pada tahun 2018 (Korea-China Relations 2021). Berdasarkan data

Kedutaan Besar Korea Selatan di Tiongkok, volume perdagangan bilateral Korea Selatan-Tiongkok mengalami pertumbuhan hampir 39 kali lipat, dari 6,3 miliar USD di tahun 1992 menjadi 243 miliar USD pada tahun 2019 (Korea-China Relations 2021).

2. Tantangan Tiongkok dalam Dinamika Kawasan Asia Timur

Tiongkok-Jepang memiliki pandangan berbeda terkait peristiwa sejarah serta hukum yang menjadi dasar klaim di antara keduanya. Fakta sejarah menyebutkan bahwa Jepang telah memenangkan Kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai rampasan dalam Perang Sino-Jepang pada tahun 1895 yang kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia II (Hahn-Kyu 2017). Ditahun yang sama, Tiongkok berlayar ke Kepulauan Pinnacle, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Huang Lei menyatakan Kepulauan Diaoyu sah atas kepemilikan Tiongkok sejak zaman kuno, yang disertai dengan bukti sejarah yang konkrit di bawah Dinasti Ming.

Berdasarkan sengketa teritorial yang terjadi, hambatan sejarah ditengah gesekan sengketa teritorial menjadi batu besar dalam hubungan bilateral Jepang-Tiongkok. Sebagai dua negara besar di kawasan, hubungan bilateral tentu akan mempengaruhi proses dinamika ataupun integrasi di kawasan Asia Timur. Oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah tantangan bagi kedua negara sebagai sebuah krisis yang dapat memengaruhi dinamika kawasan secara bilateral maupun multilateral.

Tiongkok dalam dinamika di kawasan Asia Timur juga dihadapkan dengan isu kedaulatan dengan Taiwan. Tiongkok membentuk *One China Policy* yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tiongkok dan Taiwan adalah tetap bagiannya. Dalam mengupayakan hal tersebut, Tiongkok bahkan melakukan tindakan koersif. Tiongkok telah menggunakan berbagai taktik pemaksaan selain konflik bersenjata, dan telah meningkatkan langkah-langkah ini sejak pemilihan Tsai pada tahun 2016. Tujuannya adalah untuk melemahkan Taiwan dan mendorong untuk menyimpulkan bahwa pilihan terbaik mereka adalah bersatu dengan Tiongkok.

Dalam menghadapi situasi persinggungan kepentingan tersebut, Tiongkok pada dasarnya memiliki arah kebijakan luar negeri. Maka, sejak 1996 Tiongkok menerapkan kebijakan luar negeri baru yang dikenal dengan *New Security Concept* dan *Peaceful Rise*. Prinsip *New Security Concept* secara umum

mempromosikan kebijakan keamanan melalui interaksi diplomatik dan ekonomi dalam format kemitraan. Dalam *Peaceful Rise*, Tiongkok meyakinkan negara-negara bahwa *China's Rise* tidak akan menjadi ancaman bagi perdamaian dan stabilitas kawasan hingga global bahkan sebaliknya Tiongkok menginisiasikan hubungan strategis yang akan terbentuk melalui kemitraan yang damai.

Neighbourhood Diplomacy tidak hanya untuk mendapatkan pasar atau sumber daya, namun juga untuk membendung perspektif ancaman Tiongkok. Hal itu dikarenakan Tiongkok membutuhkan ruang geraknya di sistem internasional dan mengamankan kepentingan nasional. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan tetangga adalah pilihan arah kebijakan yang strategis berdasarkan geopolitik. Tiongkok memiliki perbatasan daratan terpanjang yang lebih dari 22.000 kilometer dengan 14 negara. Berhadapan langsung dengan Semenanjung Korea, Laut Tiongkok Timur, dan Laut Tiongkok Selatan (Baxter 2019).

B. Sistem Keamanan THAAD dalam Polemik Korea Selatan-Tiongkok

1. THAAD dalam Kerjasama Keamanan Amerika Serikat-Korea Selatan

THAAD merupakan sebuah sistem keamanan anti rudal balistik atau BMDS (*Ballistic Missile Defense System*) asal Amerika Serikat. THAAD mampu mencegah ancaman dari rudal balistik dalam jarak pendek, menengah, hingga jauh bahkan ancaman dari luar atmosfer (Lockheed Martin 2023). Setiap unit THAAD tersusun dari beberapa komponen perangkat di antaranya peluncur (*launcher*), pencegat berupa rudal (*interceptors*), kendaraan peluncur jenis truk M1075 yang dipasangkan radar AN/TPY-2 dengan fungsi melacak keberadaan rudal balistik dalam rentang jarak hingga 1.000 kilometer (U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency 2019).

THAAD memiliki beberapa kelebihan yang menjadi daya tarik bagi negara terancam untuk melakukan instalasi. Mobilitas THAAD dapat disesuaikan dengan posisi titik datangnya ancaman (Institute for Security & Development Policy 2017). THAAD lebih canggih dibandingkan teknologi serupa lainnya dalam hal jangkauan radar, misal pada sistem Patriot-PAC-3 hanya dapat mendeteksi dalam lingkup *endosphere*, sedangkan THAAD mampu mencegah

ancaman *endo-atmosphere* dan *exo-atmosphere* (Institute for Security & Development Policy 2017).

Keagresifan Korea Utara dalam uji coba peledakan rudal balistik telah mengancam Korea Selatan. Sehingga Korea Selatan telah melakukan beberapa langkah preventif dalam menghadapi ancaman tersebut. Setelah Korea Utara kembali agresif dalam meluncurkan percobaan nuklir, akhirnya pada 8 Juli 2016 Amerika Serikat-Korea Selatan bersepakat untuk melakukan penempatan THAAD di Korea Selatan (United States Forces Korea 2016).

2. Respon Tiongkok terhadap Penempatan THAAD

Keputusan Korea Selatan menempatkan THAAD tidak disambut baik oleh Tiongkok. Menurut Tiongkok, lintasan ICBM miliknya akan melintasi jangkauan pencegat THAAD. Kekhawatiran Tiongkok ditambah dengan pernyataan salah satu media Tiongkok bahwa radar canggih AN/TPY akan efektif bagi pengawasan Amerika Serikat terhadap Tiongkok (Rui 2015). Pihak Tiongkok berpendapat bahwa keputusan akhir Korea Selatan dalam penempatan THAAD adalah bentuk dukungan Korea Selatan atas Amerika Serikat dalam konteks rivalitas dengan Tiongkok (Swaine 2016).

Penolakan Tiongkok terhadap penempatan THAAD berdampak serius pada polemik bilateral kedua negara. Alhasil pembalasan ekonomi menjadi bentuk polemik bilateral. Pembalasan ekonomi terhadap Korea Selatan telah terjadi dalam bentuk pertukaran barang dan jasa. Seperti pada sektor perdagangan produk asal Korea Selatan hingga konten hiburan dan sektor pariwisata. Tensi bilateral antara kedua negara menyebabkan menurunnya nilai saham perusahaan hiburan Korea Selatan, di antaranya *SM Entertainment* turun 4,8%, *YG Entertainment* turun 11,98%, dan *JYP Entertainment* turun 5,4% (Yin-Qi 2017). Selain itu, juli 2016, 53% wisatawan asing Korea Selatan berasal dari Tiongkok.

Berdasarkan data pada tahun 2017, Korea Selatan diperkirakan telah mengalami kerugian sebesar 7.5 miliar USD dengan penurunan PDB 0,5% (Yang 2019). Polemik THAAD telah membawa babak baru bagi Korea Selatan-Tiongkok hingga merugikan kedua negara. Oleh karena itu, sebagai penyelesaian masalah terdapat upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan Korea Selatan-Tiongkok. Akan tetapi, setelah penempatan THAAD,

Tiongkok mengambil tindakan kontroversial untuk melarang turis Tiongkok mengunjungi Korea Selatan.

Pada Juli 2017 Moon Jae In mengumumkan untuk menghentikan penempatan lanjutan guna meninjau dampak lingkungan dari THAAD tersebut (Reif 2017). Keputusan Korea Selatan terkait penambahan instalasi THAAD ditentang Tiongkok (Ernst 2021). Menanggapi kecaman Tiongkok, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung Wha pada 20 September mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China 2017b). Pertemuan Menteri Luar Negeri kedua negara tersebut turut melahirkan kesepakatan baru terkait permasalahan THAAD. Komitmen tersebut diberi nama dengan *Three No's* oleh Korea Selatan. Komitmen tersebut berisi: tidak ada penambahan instalasi baterai THAAD, tidak adanya keterlibatan Korea Selatan dengan Amerika Serikat terkait sistem pertahanan misil, dan tidak adanya keterlibatan Korea Selatan pada aliansi trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang (Strangarone 2019).

C. Motivasi Tiongkok Memperbaiki Hubungan Bilateral dengan Korea Selatan Pasca Polemik THAAD

Berdasarkan kerangka konseptual yang menggunakan domestic determinants dan global influences yang mengindikasikan permasalahan pada level sistemik, sehingga penulis menggunakan informasi terkait *track record* Tiongkok dalam merespon fenomena global di kawasan Asia Timur. Penulis berusaha menjabarkan motivasi Tiongkok melalui determinan kebijakan luar negeri oleh kerangka konseptual oleh Shannon L. Blanton & Charles W. Kegley dalam buku "*World Politics: Trend and transformation*". Konsep ini mengidentifikasi determinan negara dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Beberapa indikator tersebut di antaranya *Military Capabilities*, *Economic Conditions*, *Type of Government*, *Global Distribution of Power* dan *Geopolitical Factors*. Maka, tiap indikator akan digunakan untuk mengidentifikasi motivasi keputusan Tiongkok untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD.

1) Kapabilitas Militer Tiongkok

Penempatan THAAD di Korea Selatan menjadi hal yang cukup menyulitkan. Hingga pada akhirnya mendapatkan respon penolakan dari Tiongkok. Pada

bidang pertahanan keamanan, Tiongkok menentang keras dengan alasan gangguan stabilitas keamanan negaranya. Hal tersebut dinyatakan melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang pada Februari 2017 (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China 2017a). Berdasarkan sistem yang digunakan pada THAAD, Tiongkok menilai bahwa kemampuan pertahanan rudal balistik yang terintegrasi dengan Amerika Serikat dapat memantau uji coba rudal Tiongkok. Profesor asal Tiongkok, Li Bin mengidentifikasi bahwa THAAD dapat digunakan untuk memantau uji coba rudal yang diluncurkan di bagian timur laut Tiongkok. Selain itu, menurutnya THAAD dapat melacak rudal pada tahap awal dan mentransfer data lintasannya ke sistem pertahanan rudal balistik Amerika Serikat (Bin 2016).

Setelah menghadapi polemik kurang lebih satu tahun, Tiongkok menerima proposal Korea Selatan tersebut dengan isi proposal yang menguntungkan. Berdasarkan hal ini, keputusan Tiongkok untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan didasarkan atas terjawabnya kekhawatiran Tiongkok terhadap potensi ancaman keamanan. Kekhawatiran atas radar *X-Band* THAAD yang mampu mendeteksi aktivitas rudal balistik Tiongkok telah terjawab dengan tidak adanya penambahan baterai THAAD dan komitmen tidak adanya sistem pertahanan rudal balistik dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu determinan *Military Capabilities* berpengaruh dalam keputusan Tiongkok untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD.

2) Kondisi Ekonomi Tiongkok

Blanton & Kegley mengidentifikasi bahwa negara dengan tingkat perekonomian tertentu memberikan pengaruh tertentu agar negara dengan perekonomian lebih lemah memenuhi berbagai tuntutan dalam menjaga kepentingan yang dimiliki. Terkait hal tersebut, fenomena polemik THAAD antara Korea Selatan-Tiongkok menjadi bentuk nyata dalam justifikasi pernyataan berdasarkan determinan *economic conditions*.

Pada polemik THAAD dengan Tiongkok, Korea Selatan mendapatkan beberapa bentuk pembalasan ekonomi hingga berdampak pada kerugian. Padahal faktanya, Tiongkok menjadi negara dengan komunitas hallyu terbesar di kawasan Asia dan Oceania sebesar 64,2%, yang terdiri dari ±130 juta

populasi (Korea Foundation and Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea 2022). Sebagai salah satu mitra perdagangan terbesar Tiongkok, Korea Selatan telah membangun hubungan perekonomian progresif dengan Tiongkok. Hal ini mengindikasikan komitmen kuat kedua negara dalam bidang perekonomian strategis dalam hubungan bilateral Korea Selatan-Tiongkok.

Berdasarkan data, diidentifikasi bahwa pola hubungan ekonomi Korea Selatan-Tiongkok menunjukkan indikasi ketergantungan pertukaran barang maupun jasa. Setelah diterimanya proposal *Three No's* oleh Tiongkok, Tiongkok melunak. Sebab, *Three No's* memiliki hasil fungsional tertentu bagi Korea Selatan karena berhentinya fenomena pembalasan ekonomi. Sehingga, pengajuan *Three No's* oleh Korea Selatan merupakan hasil efektifitas pembalasan ekonomi Tiongkok dikarenakan posisi ketergantungan ekonomi Korea Selatan terhadap Tiongkok. Sebab, pembalasan ekonomi tercipta untuk memenuhi tuntutan tindakan politik luar negeri suatu negara dengan kekuatan ekonomi lebih besar (Baldwin 1980).

3) Tipe Pemerintahan Tiongkok

Determinan *type of government* mendeskripsikan bahwa tipe pemerintahan negara akan membatasi pilihan-pilihan penting dalam menjaga kepentingan nasional atau menghadapi ancaman eksternal. Dalam sistem pemerintahan Tiongkok terdapat sebuah partai tunggal dominan yaitu CPC (*Communist Party of China*). Secara garis besar, birokrasi kebijakan luar negeri Tiongkok tersusun dari beberapa elemen pemerintahan pusat yang terdiri dari Ketua Partai, NPC (*National People's Congress*) atau yang biasa diketahui sebagai Kongres Partai Nasional yang terdiri dari *standing committee*, serta Dewan Negara (Lai and Kang 2014).

Pihak-pihak yang terlibat pada *Standing Committee* Tiongkok memiliki fungsi dalam memutuskan untuk menerima atau membatalkan perjanjian yang dicapai dengan negara lain badan ini tetap dapat memutuskan kebijakan tertentu diluar jadwal pertemuan tahunan (The National People's Congress of the People's Republic of China 2023).

Pihak dari lembaga pemerintahan pusat Tiongkok menunjukkan sikap penolakan terhadap THAAD. Secara tidak langsung mengindikasikan suara yang sama dari pihak-pihak eksekutif birokrasi Tiongkok. Terkait dengan determinan *Type of Government*, Tiongkok diidentifikasi sebagai negara

dengan sistem satu partai yang mendominasi sehingga meminimalisir terciptanya kompleksitas pertimbangan perumusan kebijakan. Berdasarkan datatugas dan fungsi *Standing Committee* serta peran kementerian luar negeri, sistem birokrasi ini berperan signifikan dalam perumusan kebijakan luar negeri tanpa pertimbangan yang panjang dari pihak eksternal.

4) *Global Distribution of Power*

Blanton & Kegley mendeskripsikan bahwa dalam pembentukan kebijakan luar negeri, negara-negara memiliki kepentingan berbeda yang disesuaikan dengan kekuatan yang ada sebagai salah satu determinannya. Pada determinan ini akan dilihat bagaimana karakteristik polarisasi dunia. Sehingga akan ditemukan bagaimana pengaruh polarisasi yang dihadapi oleh aktor yang terlibat terkait pertanyaan penelitian.

Pada saat ini terdapat beberapa kutub kekuatan dunia, salah satunya yang masih memiliki eksistensi besar adalah Amerika Serikat. Dalam keterkaitannya dengan Korea Selatan, komitmen awal Amerika Serikat ditunjukkan pada saat konflik yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 1950. Amerika Serikat mengerahkan 8 divisi ke Semenanjung Korea selama perang 37 bulan. Komitmen Amerika Serikat berlanjut saat ini dalam mempertahankan stabilitas keamanan Korea Selatan.

Seiring berjalannya waktu, Tiongkok turut menjadi sebuah kekuatan baru dan membentuk kutub yang berpengaruh di sistem internasional. Tiongkok melakukan pembentukan institusi regional melalui kemitraan dengan negara-negara Asia hingga Afrika. Kemitraan ekonomi melalui pembentukan blok perdagangan Asia Pasifik RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*), dengan total negara anggota sepertiga dari populasi dunia sehingga mampu menampung 30% total PDB dunia (Cheung Kong Graduate School of Business 2022).

Berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa fenomena *rebalance* Amerika Serikat menjadi ancaman eksistensi bagi Tiongkok sebagai sebuah kutub kekuatan lain di sistem internasional. Berkaitan dengan determinan *global distribution of power* dapat dilihat bahwa motivasi Tiongkok memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan adalah disebabkan oleh THAAD sebagai bentuk kemitraan Amerika Serikat-Korea Selatan yang berpotensi menjadi ancaman eksistensi Tiongkok. Sebab, penerimaan

Tiongkok atas *Three No's* dapat diidentifikasi sebagai media dalam mengurangi pengaruh Amerika Serikat di sistem internasional. Pernyataan tersebut diperkuat melalui komitmen Korea Selatan atas *Three No's* yaitu tidak adanya aliansi pertahanan misil lanjutan dengan Amerika Serikat serta tidak adanya keterlibatan Korea Selatan dalam aliansi trilateral Amerika Serikat bersama Jepang.

5) Faktor Geopolitik Tiongkok

Blanton & Kegley melalui teori ini mendeskripsikan bahwa lokasi negara yang berhadapan dengan negara lain di sistem internasional memiliki pengaruh terpenting dalam penentuan kebijakan luar negeri. Hal ini dapat menganalisis studi kasus mengingat Tiongkok yang berbatasan langsung dengan banyak negara. Sehingga persinggungan kepentingan akibat pengaruh geopolitik potensial dihadapi Tiongkok.

Tantangan isu geopolitik kerap dialami Tiongkok di kawasan Asia Timur. Sengketa teritorial Tiongkok-Jepang telah membawa babak baru dalam hubungan bilateralnya. Diantara tantangan tersebut adalah sengketa kepulauan Tiongkok-Jepang, selain itu pertentangan kepentingan dalam isu kedaulatan Taiwan. Terganggunya hubungan politik dengan negara lain di kawasan tentu bukanlah hal yang baik bagi Tiongkok dalam menjaga kepentingan nasional yang dimiliki.

Semenjak 1996, Tiongkok telah mempromosikan arah kebijakan luar negeri dalam mencapai tujuan menumbuhkan rasa saling percaya, memberikan keuntungan dan kesetaraan dalam kemitraan global (Takahara 2012). Arah kebijakan tersebut diantaranya New Security Concept, Peaceful Rise dan kemudian terbentuklah arah kebijakan luar negeri dalam merangkul negara tetangga melalui *Neighbourhood Diplomacy* guna mempromosikan kemitraan strategis dalam menjaga perdamaian di kawasan dengan negara tetangga.

Oleh karena itu, dapat diidentifikasi bahwa determinan *Geopolitical Factors* telah berpengaruh dalam mengidentifikasi motivasi Tiongkok terkait studi kasus. Sebagai negara yang terlibat dalam polemik THAAD, Tiongkok menambah *track record* baru dalam persinggungan kepentingan dengan negara tetangga di Asia Timur. Hal tersebut dapat dianalisis melalui penerapan *Neighbourhood Diplomacy* yang menjadi arah kebijakan bagi Tiongkok dalam merangkul negara-negara tetangga untuk membentuk pembangunan yang

damai. Sehingga, penulis mengidentifikasi bahwa motivasi Tiongkok memperbaiki hubungan bilateral adalah guna menerapkan arah kebijakan *Neighbourhood Diplomacy*, dan mengatasi pola hubungan bermusuhan dengan negara tetangga. Sebab, Korea Selatan-Tiongkok semenjak melakukan normalisasi pada tahun 1992 telah menjadi negara tetangga yang strategis melakukan kemitraan bilateral hingga multilateral.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian telah dioperasionalkan determinan kebijakan luar negeri dalam menganalisis motivasi Tiongkok memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD. Pertama, *Military Capabilities*, asumsi Tiongkok terhadap radar *X-Band* menyatakan bahwa sistem ini mampu mendeteksi aktivitas rudal balistik Tiongkok dan mengirim data informasi kepada Amerika Serikat serta probabilitas terganggunya stabilitas domestik dan kawasan. Akan tetapi, penerimaan *Three No's* di antara kedua negara diidentifikasi sebagai telah terjawabnya kekhawatiran kepentingan keamanan Tiongkok melalui isi *Three No's*.

Kekuatan ekonomi Tiongkok telah menimbulkan kerentanan bagi Korea Selatan. setelah terdampak pada pembalasan ekonomi sebagai bentuk imbas dari penolakan Tiongkok atas THAAD, Korea Selatan kemudian menginisiasikan proposal untuk memperbaiki hubungan bilateral. Tipe pemerintahan Tiongkok yang hanya terdiri dari partai tunggal tidak memberikan kompleksitas dalam perumusan kebijakan. Peran Standing Committee dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam menolak penempatan THAAD telah menggambarkan suara dari pemegang wewenang keputusan kebijakan luar negeri. Sehingga setelah diusulkannya *Three No's*, Tiongkok secara responsif menerima proposal komitmen Korea Selatan tersebut sebagai jawaban dari penolakan pihak-pihak berwenang tersebut.

Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai pihak yang terlibat pada studi kasus penelitian merupakan contoh beberapa bentuk dari polarisasi dunia saat ini. Hal ini memungkinkan terciptanya pertentangan dalam sistem internasional. Amerika Serikat semenjak Perang Dingin berakhir telah berkiprah sebagai negara *superpower* yang mengeksekusi kekuatannya. Hal serupa juga dilakukan Tiongkok setelah kebangkitannya, Tiongkok turut menyebarkan pengaruh kekuatan yang dimiliki secara progresif. Terkait dengan penempatan

THAAD, penolakan Tiongkok diidentifikasi sebagai penentangan dari pengaruh Amerika Serikat, sehingga *Three No's* menjadi media untuk mengurangi pengaruh dalam kecenderungan Korea Selatan terhadap Amerika Serikat di sistem internasional dalam konteks *global distribution of power*.

Terakhir, determinan *Geopolitics Factor* turut berpengaruh dalam motivasi Tiongkok memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan. Dalam menghadapi ancaman geopolitik, Tiongkok membentuk arah kebijakan yang mengedepankan kemitraan dalam mencapai keharmonisan global yang salah satunya melalui arah kebijakan *Neighbourhood Diplomacy*. Sebab, setelah menciptakan pola hubungan yang menghadirkan tensi dan permusuhan dengan negara tetangga lainnya, Tiongkok memerlukan tindakan lunak dalam merangkul kembali negara-negara yang menghadapi persinggungan kepentingan dengan Tiongkok. Sehingga dalam mencapai hal tersebut, *Neighbourhood Diplomacy* diterapkan dalam memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD.

Maka, berdasarkan determinan kebijakan luar negeri yang dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui determinan *Military Capabilities*, *Economic Conditions*, *Type of Government*, *Global Distributions of Power*, dan *Geopolitics Factor* telah diidentifikasi bahwa kelima determinan ini berpengaruh dalam motivasi Tiongkok memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, David A. 1980. "Interdependence and Power: A Conceptual Analysis." *International Organization* 34(4): 471–506. <http://www.jstor.org/stable/2706510?origin=JSTOR-pdf>.
- Baxter, Tom. 2019. "Rising China in the Eyes of Its Closest Neighbours." *The Third Pole*. <https://www.thethirdpole.net/en/regional-cooperation/china-neighbours/>.
- Bin, Li. 2016. "The Security Dilemma and THAAD Deployment in the ROK." *Carnegie Endowment For International Peace*. <https://carnegieendowment.org/2016/08/03/security-dilemma-and-thaad-deployment-in-rok-pub-64279>.
- Cheung Kong Graduate School of Business. 2022. *RCEP: Can Multilateralism Lead to Economic Growth in Asia Pacific*. <https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9DS0dTQiUyMFJlcG9ydF9SQoVQXoZJTkFMLnBkZg==>.
- Defense, U.S. Department of. 2016. *Republic of Korea and the United States Make Alliance Decision to Deploy THAAD to Korea*.

- <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/831178/republic-of-korea-and-the-united-states-make-alliance-decision-to-deploy-thaad/>.
- Ernst, Maximilian. 2021. "Limits of Public Diplomacy and Soft Power : Lessons From the THAAD Dispute for South Korea's Foreign Policy." *Korea Economic Institute of America* (April).
- Hahn-Kyu, Park. 2017. "The China-Japan-South Korea Trilateral Summit: Realpolitik or Liberal Peace?" In *China-Japan Relations in the 21st Century: Antagonism Despite Interdependency*, Singapore: Palgrave Macmillan, 291–317.
- Ho Chung, Jae. 2014. "China's Evolving Views of the Korean-American Alliance, 1953-2012." *Journal of Contemporary China* 23(87): 425–42.
- Hwang, Jae Ho, and Lyong Choi. 2015. "Re-Thinking Normalisation between the ROK and the PRC in the Early 1990s: The South Korean Perspective." *Cold War History* 15(4): 557–78.
- Institute for Security & Development Policy. 2017. "THAAD on the Korean Peninsula." *Institute for Security & Development Policy*: 1–8. <http://isdip.eu/publication/korea-thaad/>.
- Korea-China Relations*. 2021. https://overseas.mofa.go.kr/cn-ko/wpge/m_1226/contents.do.
- Korea Foundation, and Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea. 2022. *Analysis of Global Hallyu Status*. https://issuu.com/the_korea_foundation/docs/2022_analysis_of_global_hallyu_status.
- Korea Herald. 2017. "Korea's Economic Growth May Slow Down on THAAD Impact." <https://m.koreaherald.com/view.php?ud=20170308000578>.
- Lai, Hongyi, and Su Jeong Kang. 2014. "Domestic Bureaucratic Politics and Chinese Foreign Policy." *Journal of Contemporary China* 23(86): 294–313.
- Lockheed Martin. 2023. "THAAD: Proven Integrated Air and Missile Defense." [https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/thaad.html#:~:text=The Terminal High Altitude Area,outside and inside the atmosphere. \(May 21, 2023\)](https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/thaad.html#:~:text=The Terminal High Altitude Area,outside and inside the atmosphere. (May 21, 2023)).
- Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea. 2003. *The Outcome of the Six-Party Talks*. https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=297335&srchFr=&srchTo=&srchWord=Foreign&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=700&titleNm=.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 2017a. "Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang's Regular Press Conference on February 22, 2017." https://www.fmprc.gov.cn/nanghai/eng/fyrbt_1/201702/t20170222_8526225.htm.
- . 2017b. *Wang Yi Meets with Foreign Minister Kang Kyung Wha of the ROK*. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/gjhdq_665435/2675_665437/2767_663538/2769_663542/201709/t20170925_522743.html.
- Pannier, Alice. 2020. "Bilateral Relations." In *Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice*, eds. Thierry Balzacq, Frédéric Charillon, and

- Frédéric Ramel. Paris: The Sciences Po in International Relations Political Economy, 19–33. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-28786-3>.
- Reif, Kingston. 2017. “Moon Reverses THAAD Decisions.” *Arms Control Association*. <https://www.armscontrol.org/act/2017-09/news/moon-reverses-thaad-decision> (June 18, 2023).
- Rui, Liu. 2015. “THAAD Deployment Would Transform South Korea into Cannon Fodder for U.S.” *Global Times China*. <https://www.globaltimes.cn/content/923734.shtml> (May 28, 2023).
- Strangarone, Troy. 2019. “Did South Korea’s Three Noes Matter? Not So Much.” *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2019/10/did-south-koreas-three-noes-matter-not-so-much/>.
- Swaine, Michael D. 2016. “Chinese Views on South Korea’s Deployment of THAAD.” *China Leadership Monitor* (52).
- Takahara, Akio. 2012. “The Rise of China and Its Neighborhood Diplomacy: Implications for Japanese Foreign Policy.” *Journal of Contemporary East Asia Studies* 1(1): 47–71.
- Taylor, Adam. 2017. “South Korea and China Move to Normalize Relations after THAAD Dispute.” *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/world/south-korea-and-china-move-to-normalize-relations-after-thaad-conflict/2017/10/31/60f2bad8-bde0-11e7-af84-d3e2ee4b2af1_story.html (October 31, 2022).
- The National People’s Congress of the People’s Republic of China. 2023. “Functions and Powers of the Standing Committee.” <http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c2847/201903/bcc988763e4140d298515047a9c1549a.shtml>.
- U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency. 2019. “Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).” www.mda.mil/system/thaad.html (May 22, 2023).
- United States Forces Korea. 2016. *ROK-U.S. Alliance Agrees to Deploy THAAD*. <https://www.usfk.mil/Media/Press-Products/Press-Releases/Article/831166/rok-us-alliance-agrees-to-deploy-thaad/>.
- WITS (World Integrated Trade Solutions). 2015. “Republic of Korea Trade Summary 2015.” *Korea, Rep. top 5 Export and Import partners 2015*. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/KOR/Year/2015/Summarytext> (February 17, 2023).
- Yang, Florence Wen Ting. 2019. “Asymmetrical Interdependence and Sanction: China’s Economic Retaliation over South Korea’s THAAD Deployment.” *Issues and Studies* 55(4): 1–39.
- Yin-Qi, Lai. 2017. “Ban Korea Order Was Lifted.” *China Times*. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20161207005900315> (May 31, 2023).
- Zhang, Jian. 2015. “China’s New Foreign Policy under Xi Jinping: Towards ‘Peaceful Rise 2.0’?” *Global Change, Peace and Security* 27(1): 5–19. <http://dx.doi.org/10.1080/14781158.2015.993958>.